



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4723-4732

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peranan Kedisiplinan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Kadek Intan Siti Rahayu<sup>1✉</sup>, I Dewa Ayu Putri Wirantari<sup>2</sup>

S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana Bali

Email: [intansrrahayu8@gmail.com](mailto:intansrrahayu8@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah. Sebagai kondisi dan konsekuensi seseorang dalam bekerja, disiplin kerja sangat mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kedisiplinan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini bahwa sebagian besar sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa pegawai yang belum maksimal, dilihat dari 4 indikator disiplin kerja yang meliputi ketepatan waktu, menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab yang tinggi dan ketaatan terhadap kantor. Dari empat indikator tersebut tersebut, ketepatan waktu pulang belum berjalan dengan maksimal yang dimana masih ada beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan jam pulang atau bekerja lebih dari jam kerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetapi indikator menggunakan peralatan kantor dengan baik, ketaatan dan tanggung jawab yang tinggi sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Kedisiplinan, Produktivitas, Komisi Pemilihan Umum*

## Abstract

Work discipline is one of the factors needed by an organization or government agency. As a condition and consequence of a person at work, work discipline greatly affects employee work productivity. The purpose of this study was to determine the role of work discipline in increasing the work productivity of employees at the General Election Commission Office of Bali Province. This study uses a qualitative descriptive method, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of words, pictures, and not numbers, from observable people or behavior. The results of this study show that most of them are running well but there are still some employees who are not optimal, seen from the 4 indicators of work discipline which include punctuality, using office equipment properly, high responsibility and obedience to the office. Of these four indicators, the timeliness of going home has not run optimally where there are still some employees who do not comply with the hours they go home or work more than working hours to complete their tasks. But the indicators of using office equipment properly, obedience and high responsibility have been going well.

Keywords: *Discipline, Productivity, Election Commission*

## PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang berhasil lulus atau orang yang dipilih secara khusus oleh pemerintah untuk menjalankan tugas negara yang dimana dalam bentuk sebuah pelayanan yang ditujukan ke masyarakat. Dalam instansi pemerintahan ini dibutuhkan sebuah aparatur pemerintah untuk menciptakan tujuan pembangunan nasional. Birokrasi yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh seorang aparatur sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yang wajibkan untuk mengutamakan kepentingan negara serta masyarakat diatas kepentingan pribadinya. Aparatur pemerintah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertujuan dan bertanggung jawab atas pembangunan dan menyelenggarakan negara dan senantiasa melayani kepentingan dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kinerja aparatur sangat mempengaruhi proses pencapaian kerja organisasi. Dalam sebuah organisasi, karyawan adalah kekuatan pendorong dan sumber daya komponen terpenting dalam menjiwai dan mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan kerja, motivasi, dan disiplin kerja.

Kedisiplinan kerja wajib diperhatikan serta dibentuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal kinerja seorang aparatur dalam sebuah instansi. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan sikap disiplin kerja yang hal itu merupakan salah satu faktor pendukung kerja sumberdaya berkualitas. Tingkat disiplin kerja dapat mempengaruhi kualitas kinerja

sehingga penting untuk menjaga tertib disiplin kerja tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai secara optimal. Tidak disiplin kerja, maka proses kerja organisasi tidak akan terlaksana sesuai dengan yang ada diharapkan dan membawa dampak negatif sehingga akan berpengaruh atas hasil pekerjaan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menghindari larangan dan menaati kewajiban yang telah dipengaruhi dalam Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Kedinasan yang jika dilanggar dan tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin. PP No. 53 Tahun 2010 berisi perihal larangan yang tidak boleh dilanggar serta kewajiban yang harus ditaati, dan hukuman apabila kewajiban-kewajibannya dilanggar dan tidak ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil yang ialah pedoman supaya terciptanya disiplin kerja yang baik. Peraturan diharapkan sebagai panduan serta menyampaikan arahan bagi pegawai dalam membentuk lingkungan kerja yang tertib. Menggunakan terciptanya lingkungan kerja yang baik maka semangat kerja dan efektivitas kerja pegawai akan semakin tinggi, dan proses pencapaian target dan tujuan organisasi juga akan lebih mudah diwujudkan.

Disiplin kerja digunakan untuk mengatur tindakan karyawan. Pekerjaan Karyawan harus secara sadar mematuhi dan menghormati aturan dan peraturan perusahaan untuk publik. Mencapai tujuan lembaga. Identifikasi undang-undang agensi dan praktikkan disiplin bisnis itu juga harus adil kepada karyawannya. Harus memiliki komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan sesuai dengan peraturan kerja pegawai dapat mengetahui apa yang dilarang dan apa yang tidak, sehingga meminimalkan kesalahan dan pelanggaran pegawai. .

Disiplin kerja bukan hanya untuk pegawai tingkat rendah tidak hanya itu, pimpinan instansi juga perlu mempraktikkan disiplin bisnis. semua pihak yang terlibat dalam proses kerja untuk memastikan disiplin kerja itu bisa menjadi fitur budaya dalam suatu organisasi. Terapkan disiplin, disiplin kerja membentuk budaya kerja disiplin, Mematuhi peraturan dan meningkatkan kualitas dan hasil pekerjaan yang ditugaskan.

Pegawai merupakan faktor penting sebagai penyelenggara atau pelaku dari proses yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuan instansi. Karyawan dalam mencapai tujuan perlu mengembangkan kompetensi pekerjaan, keterampilan dan pengetahuan mempertimbangkan seberapa penting peran tersebut karyawan dalam organisasi. Sehingga penting untuk pimpinan memperhatikan dan mengarahkan pegawainya untuk menjaga sebuah kedisiplinan kerja. Hal tersebut penting karena akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan atau instansi.

Kepatuhan pegawai terhadap peraturan sangat mempengaruhi tingkat kedisiplinan bekerja karena ketika karyawan bekerja tanpa mengikuti aturan dan norma. Jika perusahaan berlaku maka tujuan dan sasaran tidak akan tercapai perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan sikap tegas dari kepemimpinan agar disiplin kerja selalu terjaga dan karyawan akan merasakan selalu diperhatikan. Harus ada sanksi untuk memotivasi dan menyemangati agar karyawan selalu mengikuti dan mengikuti peraturan yang berlaku secara bersamaan Mendidik karyawan tentang kedisiplinan dalam bekerja.

Kurangnya kesadaran tenaga kerja akan pentingnya disiplin pekerjaan merupakan masalah yang dapat menurunkan produktivitas perusahaan atau instansi. Sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan karyawan tidak hanya dituntut untuk handal dalam bekerja, tetapi jugadituntut disiplin saat bertugas. Disiplin Karyawan dapat dilihat dari seberapa besar tanggung jawab dalam pelaksanaannya tugas mereka dan tingkat semangat kerja yang harus mereka miliki agar dapat meningkatkan produktivitas instansi.

Berdasarkan observasi awal, pejabat pemerintah memiliki citra positif kurang baik di mata masyarakat seperti kualitas pelayanan yang lambat dan kompleks. Masyarakat menginginkan pelayanan administrasi yang cepat, membutuhkan pelayanan yang transparan dan ingin menerima pelayanan adil dan setara tanpa diskriminasi. Meskipun ada aturannya Hukum menentukan hak dan kewajiban tertentu standar aparatur dan pelayanan berlaku, tapi masih banyak keluhan masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak keterbatasan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan. Keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang diberikan birokrasi akibat penerapan disiplin yang rendah sehingga menjadi alasan keterlambatan kinerja pelayanan prima. Oleh karena itu, dengan syarat disiplin kerja, penulis berharap bisa mengubah image pegawai yang buruk di mata masyarakat dan meningkatkan produktivitas Kinerja pegawai.

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat KPU adalah Lembaga independent yang menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum memiliki visi dan misi yang menjadi dasar pencapaian tujuan dari KPU itu sendiri. Pemilu merupakan sarana untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perangkat pemerintah khususnya KPU sebagai salah satu aparatur pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dituntut untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan senantiasa untuk meningkatkan kinerja.

Tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. Melalui amandemen terhadap UUD 1945

pasal 22 E ayat 5 maka secara eksplisit kemudian disebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 hasil amandemen tersebut maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan KPU. KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa. (Sumber: Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020).

Permasalahan pada KPU Provinsi Bali tentang kedisiplinan yaitu kurangnya ketepatan waktu pegawai saat menyelesaikan tugasnya yang dimana pegawai komisi pemilihan umum pulang larut dari waktu yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Dari uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Kedisiplinan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah peranan kedisiplinan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kedisiplinan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan memilih pendekatan ini diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya.

Fokus penelitian ini adalah peranan kedisiplinan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedisiplinan pada instansi pemerintahan sangat penting terutama pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). kedisiplinan tersebut diharapkan seluruh peraturan ditaati oleh para pegawai, bekerja sesuai dengan prosedur, sehingga pekerjaan yang diperintahkan terselesaikan dengan baik, efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitas kinerja KPU dalam menyelesaikan Tahapan Pemilu 2024.

Untuk meningkatkan kehadiran pada pegawai Sekretariat KPU Provinsi Bali memerlukan landasan atau peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut. Umumnya pegawai sekretariat KPU Provinsi Bali statusnya sama dengan pegawai instansi lain, sehingga peraturan tentang disiplin tidak ada perbedaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 1-2 menyebutkan bahwa:

- a. Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil
- b. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Terdapat dua jenis disiplin di Kantor Komisi Pemilihan Umum yaitu disiplin preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan prilaku yang diinginkan dari setiap pegawai, untuk mencegah jangan sampai para pegawai berperilaku negatif. Selain itu disiplin korektif adalah upaya penerapan disiplin kepada pegawai yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan- ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun kriteria yang dipakai dalam disiplin bagi pegawai Sekretariat KPU Provinsi Bali tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat indikator Menurut Soejono (2010:67), antara lain :

### Ketepatan Waktu

Komisi pemilihan umum memiliki peraturan kerja yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). Ketepatan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketepatan datang ke kantor KPU, ketepatan waktu pulang dan ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Salah satu komponen

penting dari kedisiplinan adalah tingkat kehadiran pegawai. Kehadiran menyangkut bagaimana pegawai menaati aturan dengan datang ke kantor sesuai dengan peraturan dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kehadiran sangat mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tingkat kehadiran yang kurang baik dapat menyebabkan pelaksanaan tugas dan proses pelayanan yang seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu menjadi terhambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Keuangan, Umum dan Logistik dapat diketahui bahwa Kantor Komisi Pemilihan Umum telah menerapkan absensi pegawai menggunakan Finger pin, yaitu sistem absensi dengan menggunakan jari tangan untuk mengidentifikasi. Penggunaan finger pin diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan disiplin kerja pegawai KPU Provinsi Bali. Untuk ketepatan waktu pulang dari hasil pengamatan penulis masih rendah dikarenakan tidak sesuai dengan jam pulang, hal tersebut pegawai menunda pulang dikarenakan masih menyelesaikan pekerjaan.

#### Menggunakan Peralatan Kantor dengan Baik

Menggunakan peralatan kantor dengan baik dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yang telah disediakan sesuai dengan fungsinya dan perilaku pegawai dalam menggunakan dan menjaga sarana dan prasarana kantor yang mendukung proses kerja dan proses pelayanan. Hasil pengamatan penulis terhadap Menggunakan peralatan kantor dengan baik sudah sesuai dengan tata tertib, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerapkan adanya lampiran yang berisikan nama, tanda tangan serta barang yang akan dipinjam oleh karena itu, pegawai KPU setiap meminjam peralatan kantor akan mempertanggungjawabkannya dengan menulis data diri di lampiran tersebut. Sarana dan prasarana merupakan faktor utama yang menunjang aktivitas kegiatan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja pegawai Sekretariat KPU Provinsi Bali. Sarana ialah sesuatu yang dapat digunakan sebagai perangkat/ peralatan dalam pencapaian maksud dan tujuan sedangkan prasarana ialah suatu yang merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan didalam suatu organisasi.

#### Tanggung Jawab Yang Tinggi

Tanggung jawab yang tinggi adalah sikap tanggung jawab yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah diamanahkan. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas merupakan salah satu bentuk sikap disiplin yang dimiliki oleh pegawai. Hasil wawancara dengan staff umum dan logistik disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan berdasarkan tupoksinya. Tanggung

jawab terhadap tupoksi yang telah diamanahkan diberikan dalam bentuk pelayanan yang terbaik karena kantor komisi pemilihan umum provinsi bali selalu berusaha memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

#### Ketaatan Terhadap Aturan Kantor

Penegakan disiplin harus dilakukan secara terus menerus sehingga karyawan dapat membiasakan diri dengan sikap disiplin. mematuhi Peraturan kantor merupakan salah satu ciri pegawai memiliki disiplin kerja yang baik. Petugas di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pegawai KPU Provinsi Bali dalam segi berpakaian sudah sesuai dengan tata tertib. Pegawai Komisi Pemilihan Umum sudah berusaha dengan maksimal untuk mentaati aturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pegawai masih dalam kategori tingkat rendah yang masih bisa ditoleransi dan tidak membutuhkan tindak lanjut yang lebih tegas.

Dalam kedisiplinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali menghimbau kepada seluruh pegawai agar senantiasa mentaati seluruh peraturan yang berlaku salah satunya dengan menjaga disiplin kerja dan etika kepada atasan dan rekan kerja. Para pegawai khususnya lingkungan KPU saat ini dituntut untuk meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan diri terutama dari kompetensi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

#### SIMPULAN

Kedisiplinan kerja wajib diperhatikan serta dibentuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal kinerja seorang aparatur dalam sebuah instansi. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan sikap disiplin kerja yang hal itu merupakan salah satu faktor pendukung kerja sumberdaya berkualitas. Tingkat disiplin kerja dapat mempengaruhi kualitas kinerja sehingga penting untuk menjaga tertib disiplin kerja tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai secara optimal.

Tidak disiplin kerja, maka proses kerja organisasi tidak akan terlaksana sesuai dengan yang ada diharapkan dan membawa dampak negatif sehingga akan berpengaruh atas hasil pekerjaan yang diberikan. Disiplin kerja digunakan untuk mengatur tindakan karyawan. Pekerjaan Karyawan harus secara sadar mematuhi dan menghormati aturan dan peraturan perusahaan untuk publik. Mencapai tujuan lembaga. Identifikasi undang-undang agensi dan praktikkan disiplin bisnis itu juga harus adil kepada karyawannya. Harus memiliki komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan sesuai dengan peraturan kerja pegawai dapat mengetahui apa yang dilarang dan apa yang tidak, sehingga

meminimalkan kesalahan dan pelanggaran pegawai. .

Disiplin kerja bukan hanya untuk pegawai tingkat rendah tidak hanya itu, pimpinan instansi juga perlu mempraktikkan disiplin bisnis. semua pihak yang terlibat dalam proses kerja untuk memastikan disiplin kerja itu bisa menjadi fitur budaya dalam suatu organisasi. Terapkan disiplin, disiplin kerja membentuk budaya kerja disiplin, Mematuhi peraturan dan meningkatkan kualitas dan hasil pekerjaan yang ditugaskan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka dapat disimpulkan mengenai kedisiplinan kerja bahwa Kedisiplinan di Kantor Komisi Pemilihan Umum sebagian besar sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa pegawai yang belum maksimal, dilihat dari 4 indikator disiplin kerja yang meliputi ketepatan waktu, menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab yang tinggi dan ketaatan terhadap kantor. Dari empat indikator tersebut tersebut, ketepatan waktu pulang belum berjalan dengan maksimal yang dimana masih ada beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan jam pulang atau bekerja lebih dari jam kerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetapi indikator menggunakan peralatan kantor dengan baik, ketaatan dan tanggung jawab yang tinggi sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Komisi Pemilihan umum meliputi sikap dan kesadaran pegawai akan pentingnya menerapkan disiplin kerja yang baik guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, keteladanan pimpinan yang dapat memberikan contoh dan teladan kepada para pegawai tentang disiplin kerja, pengawasan yang dilakukan oleh pihak pimpinan guna mengawasi pekerjaan para pegawai di Kantor serta meningkatkan produktivitas pegawai terhadap kedisiplinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ika Widya Syari.2013. "Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu". *Jurnal Ilmiah Katalogis Volume 1 Nomor 2, Februari 2013 hlm 116-12*
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salembaempat buku
- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).